

Realisasi Prinsip Kerja Sama dalam Dialog *BACAPRES* *Bicara Gagasan* di Acara Mata Najwa

Audila Resnita Putri, audilarp14@upi.edu

Jatmika Nurhadi, jatmikanurhadi@upi.edu

Sri Wiyanti, sriwiyanti7903@upi.edu

Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengkaji realisasi prinsip kerja sama antara para bacapres 2024 dengan pembawa. metode yang digunakan yaitu simak dan transkrip dalam mengumpulkan data. Sumber data berupa video dari kanal Youtube Najwa Shihab “Bacapres Bicara Gagasan” dan data penelitian dari tuturan baik bacapres dan juga pembawa acara dengan fokus pada tiga pertanyaan bertopik sama. Hasil yang ditemukan sebanyak 12 data dengan hasil sebagai berikut: realisasi pematuhan maksim terjadi pada 4 maksim, di antaranya 3 maksim kuantitas, 2 maksim kualitas, 1 maksim relevansi, serta 1 maksim pelaksanaan, sedangkan pelanggaran prinsip kerja sama terjadi pada 4 maksim, di antaranya 1 maksim kuantitas, 1 maksim kualitas, 2 maksim relevansi, serta 1 maksim pelaksanaan/cara.

Keywords: maksim, prinsip kerja sama, realisasi

Abstract. The researcher conducted this research to examine the realization of the principle of cooperation between the 2023 vice presidential candidates and the host. The method used is listening and transcribing in collecting data. The data source is a video from Najwa Shihab’s Youtube channel “Bacapres Bicara Gagasan” and research data from the speech of both vice presidential candidates and the host with a focus on three questions on the same topic. The results found were 12 data with the following result: the realization of maxim compliance occurs in 4 maxims, namely 3 maxims of quantity, 2 maxims of quality, 1 maxim of relevance, and 1 maxim of manner, while the violation of the principle of cooperation occurs in 4 maxims, namely 1 maxim of quantity, 2 maxims of relevance, and 1 maxim of manner.

Keywords: maxims, cooperation principles, realization

PENDAHULUAN

Dalam dunia politik, bahasa merupakan senjata yang digunakan untuk memperkuat atau menggoyahkan dukungan, merayu pemilih, atau memengaruhi publik. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Austin (1962) bahwa bahasa digunakan oleh penutur untuk melakukan tindakan tertentu (Darmawati & Sajarwa, 2022). Dalam sudut pandang pragmatik sendiri, bahasa merupakan verbal act yang khas. Tindakan verbal dengan istilah tindak tutur (*speech act*). Tuturan yang disampaikan penutur dengan lawan tutur tentunya akan berpengaruh terhadap konteks yang dimaksud (Citra, 2020). Penutur memainkan peran penting dalam hal ini untuk membuat pendengar memahami

apa yang dikatakan oleh orang lain. Selain itu, penutur dapat memerintah orang lain agar tertarik dengan apa yang akan dibicarakan (Wibisono dkk.,2023).

Dalam Pragmatik, dijelaskan prinsip-prinsip yang seharusnya diikuti oleh penutur agar apa yang dikatakan dapat diterima secara baik oleh orang lain (Triyana, 2019). Aturan-aturan itu dinamakan prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama atau yang lebih dikenal dengan istilah maksim adalah kaidah kebahasaan yang mengatur tindakan, penggunaan bahasa, dan penafsiran terhadap tuturan dan tindakan dari lawan bicaranya. Maksim disebut sebagai bentuk pragmatik berbasis prinsip kerja sama (Syafitri dkk., 2019). Prinsip kerja sama mengacu bahwa penutur berbicara dengan jujur, relevan, dan berusaha untuk berbicara sejelas mungkin (Yule, 1996). Prinsip kerja sama dalam berbahasa berfungsi untuk mencapai tujuan komunikatif, yaitu mendapatkan informasi atau pengetahuan lewat sebuah tuturan (Panggabean, 2019).

Filsuf H. P Grice (1967/1987) telah menetapkan standar dasar untuk mengucapkan dan menafsirkan kata-kata (ucapan) (Asriani, 2020). Sebagai bagian dari prinsip kerja sama, setiap penutur seharusnya dapat mematuhi maksim percakapan (*conversational maxim*). Maksim ini adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam berinteraksi, baik secara tekstual maupun interpersonal dalam upaya untuk mempermudah proses komunikasi (Ariefandi, 2018). Grice membagi maksim tersebut menjadi empat jenis, yaitu 1) maksim kuantitas (*maxim of quantity*), yaitu setiap peserta tutur diharapkan memberikan informasi sebanyak atau sedikit mungkin, sesuai dengan kebutuhan mitra tutur (Citra & Fatmawati, 2021). 2) maksim kualitas (*maxim of quality*), yaitu mengharuskan setiap peserta tutur untuk dapat menyampaikan sesuatu sesuai fakta dan nyata dalam bertutur (Sofiana & Hermaliza, 2021), 3) maksim relevansi (*maxim of relevance*), yaitu setiap peserta tutur dapat berkontribusi dengan relevan sesuai topik pembicaraan (Widayati, 2017), dan 4) maksim pelaksanaan (*maxim of manner*), yaitu peserta tutur harus bisa menghindari bertutur secara ambigu, kabur, dan mengharuskan bertutur secara runtut dan ringkas (Mariana & Tarigan, 2022).

Baik pematuhan maupun pelanggaran prinsip kerja sama dapat ditemui dalam setiap percakapan. Pelanggaran ini dapat terjadi di mana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun dalam sebuah percakapan, mulai dari di warung kopi, hingga debat DPR, bahkan dalam *talk show* (Setiawan dkk., 2017). *Talk show* menjadi acara yang memfasilitasi dialog antara pembawa acara dan tamu, prinsip kerja sama memberikan landasan untuk

menciptakan komunikasi yang efektif. Salah satu *talk show* yang menarik untuk menjadi objek penelitian adalah acara Mata Najwa.

Penelitian terdahulu terkait analisis prinsip kerja sama, di antaranya dilakukan oleh Wirduna & Wawadika (2022) dengan judul “Analisis Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Debat Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2019” dengan menganalisis berupa jenis pelanggaran, fungsi, dan maksud apa yang paling banyak terjadi, dengan hasil berupa pelanggaran maksim pelaksanaan/cara yang menunjukkan kandidat capres cawapres sering memberikan pertanyaan dan pernyataan secara samar, ketaksaan, dan jawaban bertele-tele. Sofiana & Hermaliza (2021) dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Debat Pemilihan Umum Calon Presiden 2019” dengan hasil, yaitu debat pemilihan umum capres 2019 menunjukkan ada empat maksim pelanggaran, yaitu 14 maksim kuantitas, 25 maksim kualitas, 26 maksim relevansi, dan 19 maksim pelaksanaan/cara.

Musawwir (2021) dengan judul “Realisasi Prinsip Kerja Sama Percakapan dalam Acara Hitam Putih di Trans7” dengan hasil yang menunjukkan bahwa acara Hitam Putih di TransTV telah merealisasikan keempat maksim prinsip kerja sama dan juga terdapat pelanggaran maksim oleh pembawa acara maupun narasumber, serta memberikan alasan mengapa pematuhan dan pelanggaran maksim itu terjadi. Lalu penelitian dari, Harpriyanti & Oktani (2016) dengan judul “Realisasi Maksim Percakapan dalam Acara Hitam Putih di Trans7” yang menunjukkan hasil yaitu acara tersebut terdapat pelanggaran maksim percakapan yang disebabkan oleh faktor sosial budaya, humor, keinginan penutur, serta perluasan atau perluasan topik pembicaraan. Kurniasih (2017) dengan judul “Realisasi Prinsip Kerja Sama Dalam Percakapan Masyarakat Sedulur Sikep Pati” dengan hasil yaitu tuturan masyarakat Sedulur Sikep terdapat informasi yang diulang sebagai bentuk penegasan, mengandung ambiguitas, dan tidak relevan, serta menyatakan bahwa tidak adanya pelanggaran maksim kualitas adalah ciri khas masyarakat Sedulur Sikep yang jujur.

Rahmah (2022) dengan judul “Prinsip Kerja Sama sebagai Pembentuk Humor dalam Acara Lapor Pak!” dengan hasil yaitu adanya pematuhan dan pelanggaran berupa sindiran, ketidaktepatan struktur kalimat, ambiguitas, dan melantur, serta menemukan hasil adanya pelanggaran dalam pembentukan humor dalam acara TV lebih digemari oleh penonton. Widayati (2017) dengan judul “Realisasi Prinsip Kerja Sama (maksim)

dalam Percakapan Anak Usia Prasekolah” dengan hasil menunjukkan bahwa percakapan komunikasi anak usia prasekolah kurang mematuhi aturan kerja sama. Akibatnya, mereka membuat jawaban yang berlebihan, berbelit-belit, serta tidak relevan dengan topik pembicaraan. Rahmawati (2021) dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesantunan Berbahasa Percakapan dalam Acara “Mata Najwa”” dengan temuan yang menunjukkan bahwa tujuan pelanggaran prinsip kesantunan dan prinsip kerja sama, yaitu tindak representatif direktif, dan tindak ekspresif. Tindak representatif yang paling sering ditemukan dalam pelanggaran prinsip kesantunan dan prinsip kerja sama.

Lalu, penelitian dari Andika & Amin (2022) dengan judul “Prinsip Kerja Sama (*Cooperative Principle*) dalam Tayangan Mata Najwa Episode “Ringkusan Predator Seksual Kampus”” dengan temuan menunjukkan terdapat pelanggaran dan pematuhan prinsip kerja sama, serta memberikan apa makna tuturan dan bagaimana terjadinya pelanggarannya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yaitu berupa video dari laman Youtube Najwa Shihab yang bertemakan dialog politik. Topik yang dipilih berfokus pada realisasi prinsip kerja sama pada video Bacapres Bicara Gagasan dengan tujuan untuk mengkaji apakah terjadi pematuhan atau pelanggaran terhadap prinsip kerja sama.

Mata Najwa adalah acara yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh dan dengan tema yang diangkat, membuat tontonan ini layak diperhitungkan karena memuat nilai-nilai edukatif tinggi (Ahsanurrijal & Setiaji, 2019) Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana prinsip kerja sama diterapkan dalam dialog antara bintang tamu dan pembawa acara menggunakan pendekatan pragmatik karena prinsip kerja sama dianggap sebagai landasan komunikasi yang efektif dalam diskusi publik, seperti *talk show*, karena dapat memengaruhi cara orang mendengarkan dan menerima informasi. Objek tersebut dipilih karena diskusi pemaparan gagasan dari bakal calon presiden 2024 tentunya menjadi sorotan masyarakat luas saat ini, bagaimana gagasan tersebut disampaikan, diterima, dan berinteraksi dengan pembawa acara melalui penggunaan bahasa dan strategi komunikasi menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terjadi pelanggaran atau tidaknya prinsip kerja sama dalam diskusi para bacapres tersebut dengan pembawa

acara, yaitu Najwa Shihab. Pelanggaran-pelanggaran prinsip penggunaan bahasa menunjukkan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh penutur (Amalia dkk, 2019). Penelitian kali ini juga bertujuan untuk menemukan alasan terjadinya pelanggaran antara para bacapres dengan pembawa acara terhadap pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman komunikasi, khususnya dalam *talk show* politik. Melalui analisis pragmatik, penelitian dapat membuka wawasan tentang bagaimana pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam komunikasi politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode simak. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data lisan dari sampel video kanal Youtube Najwa Shihab dengan topik “Bacapres Bicara Gagasan”. Selain itu, digunakan juga metode catat, dengan cara mentranskripsikan tuturan-tuturan para bacapres dan pembawa acara. Sumber data penelitian ini yaitu kanal Youtube Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa. Peneliti mengambil video yang bertemakan Bacapres Bicara Gagasan yang berdurasi 6 jam 37 menit dengan menampilkan diskusi masing-masing bacapres dengan pembawa acara dalam sesi yang berbeda. Adapun data penelitian berupa tuturan para bacapres dan pembawa acara. Fokus penelitian pada 4 topik pertanyaan yang sama yang diajukan pembawa acara kepada 3 bacapres, di antaranya mengenai LHKPN, polisi, KPK, dan kebebasan berpendapat. Selanjutnya, data disajikan dengan menggunakan kartu data yang telah diadopsi dari penelitian Sentosa dkk. (2021).

Tabel 1. Kartu Data Prinsip Kerja Sama

NO. Data	Tuturan	Fenomena Prinsip		Jenis Maksim	Menit
		PPKS	PLPKS		

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data penelitian berupa tuturan para bacapres dan pembawa acara dengan 4 pertanyaan yang sama ditemukan 12 data terkait pelanggaran dan pematuhan prinsip kerja sama.

Tabel 2. Hasil Data Prinsip Kerja Sama *Bacapres Bicara Gagasan*

NO. Data	Tuturan	Fenomena Prinsip		Jenis Maksim	Menit
		PPKS	PLPKS		
Pertanyaan pertama: tentang LHKPN					
1.	Najwa: “Saya akan mengeluarkan LHKPN Anda Mas Anies karena untuk menjabat publik kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023 dan mohon maaf Mas Anies Anda Bacapres yang paling miskin Mas kekayaan Anda 11,19 miliar saya akan...” Anies: “hutangnya berapa?”		V	Maksim relevansi	29:40
2.	Najwa: “Saya juga ingin tunjukkan harta kekayaan Pak Prabowo, kita lihat bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia maju harta Prabowo Subianto tertinggi di antara bacapres yang lain Pak 2,04 triliun rupiah. Pak Prabowo sebelumnya, biaya politik yang tinggi. apakah itu artinya Bapak relatif aman karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres tiga kali?” Prabowo: “Mbak Nana saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih ya dan kalau Anda mengerti bisnis ada perbedaan antara aset yang dinilai ya tanah aset dinilai ada nilainya dan cash uang yang bisa dipakai aset saya kalau dipelajari banyak aset tapi juga yang tidak bersifat cash bahkan banyak aset saya. Pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit karena Saya tidak berkuasa 20 tahun Mbak”		V	Maksim relevansi	28.28
3.	Najwa: “Tadi dengan Mas Anies Saya mau mulai perbincangan dengan membuka LHKPN Mas, jadi saya juga ingin membuka LHKPN Mas Ganjar” Ganjar: “Dengan senang hati” Najwa: “Yang memang sudah terbuka untuk publik kita akan Tunjukkan” Ganjar: “Dan Saya sudah laporkan, terakhir saya 5 hari kurang, kurang lebih 3 hari Setelah saya selesai”	V		Maksim relevansi	22.03
Pertanyaan Kedua: tentang polisi					
4.	Najwa: “Saya memulai dengan Polisi Mas yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini <i>Real concrete</i> , rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan?” Anies: “Gini kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel transparan, bersih dan menurut saya langkah nomor satu adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian.	V		Maksim pelaksanaan	29.28

	<p>Semua langkah yang dikerjakan adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan ada transparansi atas semua yang dilakukan, mengapa? karena ada institusi publik itu adalah transparansi dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah tingkat Polsek”</p>				
5.	<p>Najwa: “Mulai dengan Kepolisian, apakah ada cara Anda untuk mereformasi kepolisian?” Prabowo: “Saya kira semua institusi harus kita kaji yang mana kita rasakan kurang pas ya kita perbaiki itu namanya reformasi, reformasi hukum, reformasi institusi, dan sebagainya. Saya kira yang paling penting adalah pengawasan diri ya auto auto kritik atau auto pengawasan kita minta semua institusi membenahi diri dan itu harus dikendalikan oleh sistem yang kuat dengan sistem audit dengan BPK yang aktif, dengan BPKP yang aktif, dengan KPK yang aktif ini membuat jerat kalau kita lihat kepolisian sekarang kita lihat beberapa jenderal-jenderal pun dihukum jenderal-jenderal yang seolah berkuasa bisa dihukum. Ini juga terjadi di lingkungan komunitas pertahanan ada beberapa Jenderal yang menyeleweng di lembaga-lembaga kita, kita minta Kejaksaan untuk usut kita berikan Kejaksaan dan kalau tidak salah mereka sudah dihukum mereka dalam penjara sekarang jadi saya termasuk yang undang BPKP BPK KPK dan Kejaksaan untuk masuk ke lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI semuanya”</p>		V	Maksim kualitas	37.51
6.	<p>Najwa: “Penguatan Lembaga KPK Anda sudah memberikan komitmen akan memperkuat KPK Bagaimana dengan Polisi Mas Ganjar?” Ganjar: “Sama Mbak, polisi saya kira...” Najwa: “Polisi kurang kuat mas sekarang?” Ganjar: “Sangat” Najwa: “Terlalu kuat?” Ganjar: “Bukan, hari ini orang membicarakan polisi secara terbuka kok Mbak”</p>		V	Maksim pelaksanaan	34.09
Pertanyaan Ketiga: tentang kpk					
7.	<p>Najwa: “Saya mau tanya dulu Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen?” Anies: “KPK harus independen lagi seperti dulu ya”</p>	V		Maksim kuantitas	34.07
8.	<p>Najwa: “Apakah penilaian itu menurut Anda akan bisa membuat Anda berpikir untuk merevisi undang-undang KPK yang dinilai melemahkan KPK saat ini Pak?” Prabowo: “Ya, kita nanti akan kumpulkan stakeholder pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa kita harus cari yang terbaik untuk bangsa”</p>	V		Maksim kuantitas	40.17
9.	<p>Najwa: “Jadi tidak sependapat bahwa KPK harus dibubarkan malah Justru harus dikuatkan sepakat dikuatkan?” Ganjar: “Sepakat dikuatkan”</p>		V	Maksim kuantitas	32.37

	Najwa: “Artinya Mas, Saya mau follow up dengan pernyataan dengan pertanyaan yang lebih konkret artinya Apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan dikembalikan lagi independensinya tidak seperti sekarang?” Ganjar: “Dikuatkan”				
Pertanyaan Keempat: kebebasan berpendapat					
10.	Najwa: “Kalau diminta kasih skor nilai 1 sampai 10 seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini menurut Anda?” Anies: “Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan wakAnda maka skor kita masih rendah. Selama kita masih harus menggunakan nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita maka skor kita masih rendah Jadi sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi ini ya nah demokrasi di kampus ini kita memperjuangkan kebebasan berbicara”	V		Maksim kualitas	60.03
11.	Najwa: “Saya ingin minta Pak Prabowo memberikan penilaian dari skala 1 sampai 10 seberapa bebas kita bisa berpendapat hari-hari ini di negeri tercinta Pak?” Prabowo: “Kalau saya rasanya ya kira-kira 1 sampai 10 mungkin 8 begitu”	V		Maksim kuantitas	42.07
12.	Najwa: “Saya ingin tanya pendapat Anda berapa nilainya Mas kalau Anda kasih kita bicara kebebasan berpendapat?” Ganjar: “Tujuh setengah”	V		Maksim kuantitas	46.09

Keterangan

- PPKS: Pematuhan prinsip kerja sama
- PLPKS: Pelanggaran prinsip kerja sama

Realisasi Maksim Kuantitas

Ditemukan sebanyak lima kali. Dari kelima data tersebut terjadi pematuhan dan pelanggaran, sebagai berikut.

Pematuhan

Data :

Anies: “KPK harus independen lagi seperti dulu ya”

Termasuk ke dalam pematuhan maksim kuantitas karena Najwa memberikan informasi mengenai rekomendasi dari tim percepatan reformasi hukum dan kebutuhan revisi undang-undang KPK untuk mengembalikan independensinya. Lalu, Anies menanggapi dengan menyatakan setuju bahwa KPK harus kembali independen seperti sebelumnya. Pernyataan Anies di atas menunjukkan bahwa KPK sekarang tidak

independen dan harus kembali seperti dulu lagi. Pernyataan itu cukup menjawab pertanyaan dari pembawa acara, serta tidak kurang dan tidak lebih dalam menanggapi pertanyaan dari pembawa acara.

Data :

Prabowo: “Ya, kita nanti akan kumpulan stakeholder pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa kita harus cari yang terbaik untuk bangsa”

Termasuk pematuhan maksim kuantitas karena pernyataan yang diberikan Najwa dan tanggapan dari Prabowo cukup mencapai pemahaman yang baik mengenai isu tersebut. Dari kalimat di atas menunjukkan bahwa Prabowo membicarakan caranya jika akan merevisi undang-undang KPK bahwa hal itu memberikan jawaban yang cukup untuk memberikan gambaran mengenai pendekatan yang akan diambil terhadap independensi KPK telah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Najwa selaku mitra tutur.

Data :

Najwa: “Saya ingin minta Pak Prabowo memberikan penilaian dari skala 1 sampai 10 seberapa bebas kita bisa berpendapat hari-hari ini di negeri tercinta Pak?”

Prabowo: “Kalau saya rasanya ya kira-kira 1 sampai 10 mungkin 8 begitu”

Termasuk ke dalam pematuhan maksim kuantitas karena Prabowo memberikan jawaban yang cukup dan tidak berlebihan terkait kebebasan berpendapat yang diajukan oleh Najwa selaku pembawa acara. Oleh karenanya, data 11 dinilai ke dalam pematuhan maksim kuantitas.

Data :

Najwa: “Saya ingin tanya pendapat Anda berapa nilainya Mas kalau Anda kasih kita bicara kebebasan berpendapat?”

Ganjar: “Tujuh setengah”

Termasuk ke dalam pematuhan maksim kuantitas karena dari jawabannya, Menunjukkan bahwa Ganjar memberikan jawaban yang tidak lebih dan tidak kurang dari pertanyaan yang diajukan oleh Najwa dan tentunya sudah cukup menjawab pertanyaan tersebut.

Pelanggaran

Data :

Najwa: “Artinya Mas, Saya mau follow up dengan pernyataan dengan pertanyaan yang lebih konkret artinya Apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan dikembalikan lagi independensinya tidak seperti sekarang?”

Ganjar: “Dikuatkan”

Data di atas termasuk pelanggaran maksim kuantitas karena kata “dikuatkan” kurang memberikan detail terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Najwa. Di awal dialog Najwa mempertanyakan “jadi tidak sependak bahwa KPK harus dibubarkan malah justru harus dikuatkan, sepakat kuatkan?”, lalu Ganjar menjawab “Sepakat dikuatkan” dan saat Najwa menanyakan lebih rinci atau lebih konkretnya bagaimana. Ganjar hanya mengulangi jawaban awalnya, yaitu “dikuatkan”. Oleh karena itu, data 9 termasuk ke dalam pelanggaran maksim kuantitas. Hal tersebut dijelaskan ketika informasi yang diberikan tidak memberikan informasi yang sesuai atau kurang memberikan informasi sesuai pertanyaan pembawa acara. Kekurangan informasi ini dapat menghambat pemahaman dan menjadikan jawabannya kurang memuaskan dari segi kejelasan.

Realisasi Maksim Kualitas

Ditemukan sebanyak dua kali. Dari kedua data dapat dijelaskan realisasinya sebagai berikut.

Pematuhan

Data :

Anies: “Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda maka skor kita masih rendah”

Termasuk ke dalam pematuhan maksim kualitas karena Anies memberikan jawaban terkait pandangannya secara jujur dan terbuka tentang kebebasan berpendapat di Indonesia. Walaupun jawaban tersebut lebih panjang dari dua bacapres yang lain. Namun, masih dalam konteks yang sama. Dari jawaban tersebut Anies memberikan penjelasan yang disertai dengan alasan logis dan runtut, seperti penggunaan kata “Wakanda” untuk mendukung penilaiannya. Dalam data di atas, informasi yang diberikan Anies mengandung kebenaran yang disertai dengan alasan logis, seperti penggunaan kata “Wakanda” untuk mendukung atau meyakinkan jawabannya.

Pelanggaran

Data :

Prabowo: “Kita minta Kejaksaan untuk usut kita berikan Kejaksaan dan kalau tidak salah mereka sudah dihukum mereka dalam penjara sekarang”

Data di atas termasuk pelanggaran maksim kualitas karena informasi yang disampaikan Prabowo dalam memberikan pandangan umum mengenai rencana reformasi yang awalnya dijelaskan secara runtut, mulai bagaimana reformasi itu, termasuk menjelaskan rencana reformasi tersebut mulai dari fokus pada pengawasan diri, membenahi diri, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti BPK, BPKP, KPK, dan Kejaksaan. Dari kalimat di atas, memberikan penjelasan yang kurang akurat karena kata “*kalau tidak salah*” yang menunjukkan keraguan akan kebenaran yang diungkapkan karena kurangnya bukti. Sehingga dapat ditentukan bahwa tuturan tersebut melanggar maksim kualitas di mana peserta tutur diharuskan berbicara atas bukti-bukti yang memadai.

Realisasi Maksim Relevansi

Ditemukan sebanyak tiga kali. Dari ketiga data dapat dijelaskan realisasinya sebagai berikut.

Pematuhan

Data :

Najwa: “Tadi dengan Mas Anies Saya mau mulai perbincangan dengan membuka LHKPN Mas, jadi saya juga ingin membuka LHKPN Mas Ganjar”

Ganjar: “Dengan senang hati”

Konteks percakapan, yaitu pembawa acara akan membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ganjar Pranowo, lalu Ganjar menjawab. Maksud dari “*dengan senang hati*” adalah Ganjar tidak keberatan saat pembawa acara akan menunjukkan LHKPN miliknya kepada penonton. Lalu, ia menambahkan tanggapan yang masih relevan dengan topik LHKPN.

Ganjar: “Dan Saya sudah laporkan, terakhir saya 5 hari kurang, kurang lebih 3 hari Setelah saya selesai”

Data di atas termasuk pematuhan maksim relevansi karena tanggapan dari Ganjar benar-benar merupakan tanggapan atas pernyataan yang dituturkan oleh pembawa acara untuk menunjukkan LHKPN.

Pelanggaran

Data :

Anies: "Hutangnya berapa?"

Termasuk ke dalam pelanggaran maksim relevansi karena tidak terlihat relevan dengan pernyataan Najwa mengenai LHKPN dan kekayaan Mas Anies. Dalam dialog tersebut, Anies secara tiba-tiba mempertanyakan hutangnya saat Najwa menunjukkan LHKPN di layar. Walau terlihat masih relevan, yaitu mengenai hartanya, tetapi idealnya pertanyaan tersebut seharusnya lebih fokus pada informasi terkait LHKPN atau dapat diarahkan ke topik yang lebih sesuai dengan konteks yang ditunjukkan. Oleh karena itu, data di atas tidak termasuk pematuhan maksim relevansi karena tidak memberikan kontribusi yang diminta lawan bicaranya sehingga data di atas termasuk ke dalam pelanggaran maksim relevansi.

Data :

Prabowo: "...kalau Anda mengerti bisnis..."

Prabowo: "...Pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit karena Saya tidak berkuasa 20 tahun Mbak"

Termasuk ke dalam pelanggaran maksim relevansi karena jawaban Prabowo terkesan sebagai pembelaan atau klarifikasi terhadap kondisi keuangan Prabowo yang tidak sepenuhnya terkait dengan informasi yang telah disampaikan oleh Najwa. Meskipun Prabowo memberikan informasi tambahan tentang aset dan kondisi bisnisnya, jawaban Prabowo seolah mengalihkan pembicaraan ke topik yang kurang relevan dengan pernyataan Najwa, yaitu mengenai bisnis dan juga pabriknya.

Realisasi Maksim Pelaksanaan/Cara

Ditemukan sebanyak 2 kali. Dari kedua data dapat dijelaskan realisasinya sebagai berikut:

Pematuhan

Data :

Anies: "Semua langkah yang dikerjakan adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan ada transparansi atas semua yang dilakukan, mengapa? karena ada institusi publik itu adalah transparansi dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah tingkat Polsek"

Termasuk ke dalam pematuhan maksim pelaksanaan. Jawaban dari Anies menyatakan gambaran umum tentang langkah-langkah yang akan diambil secara runtut sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jawaban dari Anies pun tidak berbelit-belit, ia juga memberikan alasan logis mengapa langkah tersebut ia ambil.

Pelanggaran

Data :

Najwa: "Polisi kurang kuat mas sekarang?"

Ganjar: "Sangat"

Najwa: "Terlalu kuat?"

Jawaban dari Ganjar terkesan ambigu serta tidak runtut. Jawaban Ganjar "*Sangat*" menunjukkan keambiguan sehingga Najwa mempertanyakan kembali atas pernyataan dari Ganjar tersebut. Walaupun, Ganjar menjelaskan lebih rinci setelah pembawa acara mempertanyakan kembali, tetapi jawaban pertamanya yang ambigu menunjukkan adanya pelanggaran maksim pelaksanaan. Sehingga, data di atas termasuk ke dalam pelanggaran maksim relevansi karena tuturan Ganjar yang ambigu atau kabur dalam memberikan jawaban terkait pertanyaan dari pembawa acara.

Realisasi pelanggaran prinsip kerja sama dalam diskusi *Bacapres Bicara Gagasan* berdasarkan 12 data, terdiri atas 4 maksim. Alasan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama, di antaranya 1) alasan pelanggaran maksim kuantitas terjadi karena tidak memperkuat alasan atau memberikan jawaban yang lebih jelas saat pembawa acara mengajukan pertanyaan sehingga pembawa acara perlu menanyakan kembali untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas, 2) pelanggaran maksim kualitas terjadi karena adanya keraguan akan jawaban yang dituturkan dan kurang adanya bukti yang dapat mendukung perkataan tersebut, 3) pelanggaran maksim relevansi terjadi karena jawaban dari bacapres menyimpang dari topik yang diberikan oleh pembawa acara, dan 4) pelanggaran maksim pelaksanaan/cara terjadi karena adanya keambiguan dari jawaban yang diberikan atas pertanyaan pembawa acara.

Dalam penelitian kali ini ditemukan pematuhan maksim terjadi sebanyak 7 kali, yaitu 3 maksim kuantitas, 2 maksim kualitas, 1 maksim relevansi, dan 1 maksim pelaksanaan. Sedangkan, pelanggaran prinsip kerja sama terjadi sebanyak 5 kali, yaitu 1 maksim kuantitas, 1 maksim kualitas, 2 maksim relevansi, dan 1 maksim pelaksanaan. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Andika dan Amin (2022) ditemukan 5 data, dengan 1 pematuhan maksim kuantitas, 1 pematuhan maksim kualitas, 1

pematuhan maksim relevansi, 1 pematuhan maksim cara, serya 1 pelanggaran maksim kuantitas hal itu menunjukkan tayangan tersebut menerapkan prinsip kerja sama dengan baik. Sama halnya dengan penelitian kali ini yang menunjukkan pematuhan prinsip kerja sama lebih banyak ditemukan dibanding pelanggaran prinsip kerja sama sehingga interaksi antara bacapres dan pembawa acara dapat dikatakan berjalan secara cukup efektif.

SIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap empat pertanyaan yang sama yang diajukan oleh pembawa acara dalam video “Bacapres Bicara Gagasan” dapat disimpulkan bahwa pematuhan prinsip kerja sama lebih banyak ditemukan daripada pelanggarannya dengan hasil yaitu 7 pematuhan dan 5 pelanggaran prinsip kerja sama. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan pula bahwa realisasi prinsip kerja sama antara masing-masing bacapres dengan pembawa acara menunjukkan bahwa Anies Baswedan lebih mematuhi prinsip kerja sama yang hanya melanggar 1 kali, dibanding Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang melanggar prinsip kerja sama sebanyak 2 kali.

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan yang mendalam mengenai bagaimana prinsip kerja sama dapat meningkatkan kualitas dialog politik, lalu melalui penelitian ini, dapat meningkatkan literasi politik masyarakat, dengan memahami bagaimana prinsip kerja sama diwujudkan dalam dialog politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanurrijal, & Setiaji, A. B. (2019). Implikatur dan Prinsip Kesantunan dalam Acara Talk Show Mata Najwa Trans 7 (Tinjauan Pragmatik). *Jurnal Lingue: Bahasa, Budaya, Dan Sastra*, 1(2), 149–156.
- Amalia, R. N., Retnowaty, & Maulida, N. (2019). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Dalam Acara Talk Show Rosi di Kompas Tv. *Kompetensi*, 12(2), 137–146. <https://doi.org/10.36277/kompetensi.v12i2.28>
- Andika, F., & Amin, M. F. (2022). Prinsip Kerja Sama (Cooperative Principle) dalam Tayangan Mata Najwa Episode “Ringkus Predator Seksual Kampus.” 17(4).
- Ariefandi, F. (2018). Ilokusi yang Memberikan Efek Humor kepada Pembaca dalam Manga Azumanga Daioh. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 14(2), 118–138. <https://doi.org/10.33633/lite.v14i2.2324>

-----Vol 7, Nomor 1 Mei 2024, Halaman 78-93-----

- Asriani. (2020). Implikatur Dalam Novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur Karya Muhidin M.Dahlan. 4(1), 716–724.
- Citra, E. (2020). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Percakapan Najwa Shihab dan Joko Widodo di Metro TV. 7(2).
- Citra, Y., & Fatmawati. (2021). Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dalam Program Mata Najwa di Trans 7. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 7(2), 437–448. <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i2.1278>
- Darmawati, D., & Sajarwa, S. (2022). Pragmatic Equivalence of Expressive Speech Act in Television Series Bridgerton. *Lite*, 18(1), 43–53. <https://doi.org/10.33633/lite.v18i1.5630>
- Harpriyanti, H., & Oktani, H. S. (2016). Realisasi Maksim Percakapan dalam Acara Hitam Putih di Trans7. *STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.33654/sti.v1i1.319>
- Kurniasih, E. (2017). Realisasi Prinsip Kerja Sama dalam Percakapan Masyarakat Sedulur Sikep Pati. *Deiksis*, 9(02), 109. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v9i02.1202>
- Mariana, D., & Tarigan, B. (2022). Pelanggaran prinsip kerja sama pada acara catatan najwa episode susahny jadi perempuan. *Jurnal Sinestesia*, 12(1), 2022. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/145>
- Musawwir. (2021). Realisasi Prinsip Kerja Sama Percakapan Dalam Acara Hitam Putih di Trans7. 3(2), 85–98.
- Panggabean, S. (2019). Pragmatik Diktat Untuk Kalangan Sendiri. *Probasasindo*. [https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3932/DIKTAT PRAGMATIK.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3932/DIKTAT_PRAGMATIK.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Rahmah, S. D. F. A. A., & Mulyono. (2022). Prinsip Kerja Sama Sebagai Pembentuk Humor dalam Acara Laporan Pak! *Bapala*, 9(9), 77–85.
- Rahmawati, N. (2021). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesantunan Berbahasa Percakapan dalam Acara “Mata Najwa.” *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.30998/diskursus.v4i1.9408>
- Sentosa, A. R., Septiaji, A., & Sutrisna, D. (2021). Pematuhan dan Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Gelar Wicara Mata Najwa dan Kick Andy. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, c, 432–441.
- Setiawan, A., Basuki, R., & Rahayu, N. (2017). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Percakapan dalam Acara Mata Najwa di Metro TV. 2(1), 63–80.
- Sofiana, & Hermaliza. (2021). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Debat Pemilihan Umum Calon Presiden 2019. 1, 95–104.

- Syafitri, Y. D. T., Budiarti, V., Simamora, A., & Aprilya, R. (2019). Examining Various Interpretations of Grice's Cooperative Principle. *Elsya : Journal of English Language Studies*, 1(2), 50–54. <https://doi.org/10.31849/elsya.v1i2.3527>
- Triyana, E. (2019). Humor sebagai Bentuk Pelanggaran Maksim Kerja Sama dalam Animasi *Saiki Kusou No Psinan*. 15(2).
- Wibisono, G., Kusmiyati, & Faizin, A. (2023). Analisis Pelanggaran dan Pematuhan Prinsip Kerja Sama pada Novel Perfect Couple Karangan Asri Aci Galih. *Fonema*, 6, 51–59. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25139/fn.v6i1.6131>
- Widayati, W. (2017). Realisasi Prinsip Kerja Sama (Maksim) dalam Percakapan Anak Usia Prasekolah. *Fonema*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.25139/fonema.v4i1.410>
- Wirduna, & Wawadika, U. (2022). Analisis Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Debat Cawapres Republik Indonesia Tahun 2019. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford Introductions to Language Study Series.